

DOKUMEN

LAPORAN EVALUASI RENCANA AKSI

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan karunianya, sehingga Laporan Realisasi Rencana Aksi Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar dapat di susun.

Dokumen Laporan Realisasi Rencana Aksi Capaian Kinerja Triwulan IV Dinas PMPTSP Tahun 2023 disusun sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan/kegagalan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Semoga dengan tersusunnya Laporan Realisasi Rencana Aksi Capaian Kinerja Triwulan IV Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 ini dapat dijadikan pedoman terkait pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023.

Benteng, 31 Desember 2023

Kepala Dinas PMPTSP,

Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660507 198603 1 022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, aspirasi dan cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan kinerja, meliputi: komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Monitoring dan evaluasi dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah Evaluasi Rencana Aksi Kinerja untuk memantau setiap perubahan- perubahan dan perbaikan atas rencana aksi pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian Kinerja (PK) sehingga dapat mendeteksi secara lebih dini tentang hasil capaian kinerja secara berkala, faktor penghambat serta faktor pendukung sehingga dapat ditemukan upaya- upaya perbaikan sehingga capaian kinerja dapat dicapai lebih optimal.

1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Laporan Realisasi Rencana Aksi Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah tersusunnya Laporan Realisasi Rencana Aksi untuk tahun 2023, dan tujuan disusunnya laporan Realisasi Rencana Aksi Tahun 2024 yaitu:

- a. Untuk mengukur dan menilai tingkat keberhasilan pencapaian target kinerja berdasarkan rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2023;
- b. Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Untuk memberikan umpan balik (*feedback*) untuk perbaikan kinerja pada Triwulan berikutnya atas capaian kinerja pada Tahun 2023;
- d. Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung menuju terwujudnya *good*

governance, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Realisasi Rencana Aksi Capaian Kinerja Triwulan IV Dinas Penanaman Modal Tahun 2023 seperti berikut :

BAB I PENDAHULUAN : Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika laporan.

BAB II RENCANA AKSI : 1. Menyajikan mengenai Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu periode 2021- 2026, Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan Rencana Aksi.
2. Menyajikan capaian realisasi rencana aksi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 yang memuat hasil capaian kinerja (sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan) dengan penjelasan keberhasilan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja

BAB III PENUTUP : Menyajikan kesimpulan atas capaian realisasi kinerja rencana aksi Triwulan IV tahun 2023 dan saran perbaikan atas permasalahan dalam pencapaian kinerja.

BAB II

RENCANA AKSI

2.1 Rencana Strategis Rencana Strategis (RENSTRA)

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam merumuskan dan menentukan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) sebagaimana untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar serta menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Kementerian sebagaimana tertuang dalam Renstra tahun 2021 s/d 2026 Dinas PMPTSP.

Dinas PMPTSP dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Struktur kelembagaan yang menjadi tanggung jawabnya maka diperlukan langkah- Langkah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis, operasional di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai kebijaksanaan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyiapkan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang tugasnya;
4. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan ketatausahaan;
5. Pelaksanaan tugas-tugas pembantuan dari pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya;
6. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan ketatausahaan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas dan sebagai implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026 maka Dinas PMPTSP mempunyai 2(dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD tahun 2021 – 2026, sebagai berikut :

Tujuan : Mewujudkan reformasi birokrasi (T-1)

Sasaran : Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan (S-1)

Tujuan : Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman (T-5).

Sasaran : 1. Meningkatnya Usaha Perikanan (S-6)

2. Meningkatnya Usaha Pariwisata (S-7)

3. Meningkatnya usaha Kepelabuhanan (S-8)

2.2. Indikaror Kinerja Utama (IKU)

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Dinas PMPTSP.

Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut sesuai dengan Tujuan dan sasaran Renstra dan sebagai implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026 maka Dinas PMPTSP mempunyai strategi dan arah kebijakan Serta indikator – indikator yang harus capai.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar secara berkelanjutan.

Adapun Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Keterkaitan antara tujuan, sasaran, startegi dan arah kebijakan adalah untuk menetapkan dan mencapai indikator sasaran, untuk mengukur indikator tersebut di jabarkan kembali menjadi indikator kinerja yang lebih menajam disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran, persentase barang milik daerah yang terpelihara, Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti, Indek Akuntabilitas Kinerja dan Persentase realisasi Belanja Langsung dan Tidak langsung, yang dapat dilihat melalui table berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2023
I.	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	Nilai SAKIP OPD	B(65)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	72,50%
II.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Sesuai
III.	Meningkatnya kerjasama investasi	Persentase penigkatan nilai investasi	1,50%
		Nilai Investasi PMDN (Rp Juta)	38.500
		Nilai Investasi PMA (\$ Juta)	1,50
IV.	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsive	Persentase izin usaha dan investasi yang dikeluarkan	100%

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2023 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026. Oleh karena itu, Indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini adalah indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026, serta Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas PMPTSP Tahun 2021 – 2026. Pencapaian target pada Indikator Kinerja Utama tidak lepas dari program / kegiatan dan alokasi anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas PMPTSP. Untuk lebih jelasnya Perjanjian Kinerja dengan Program/Kegiatan dan Anggaran pada Dinas PMPTSP Tahun 2023 secara terinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas PMPTSP Tahun 2023

NO.	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023		KET
		TARGET	ANGGARAN	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	72,50%	4.527.036.022,-	
a.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	25.000.000,-	
b.	Administiras2 Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.805.752.022,-	
c.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	12.000.000,-	
d.	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	-	

NO.	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023		KET
		TARGET	ANGGARAN	
e.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	131.666.400,-	
f.	Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		477.497.600,-	
g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32 Unit	75.120.000,-	
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100%	50.000.000,-	
a.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/Kota	100%	50.000.000,-	
3.	Program Promosi Penanaman modal	24 Perusahaan	340.000.000,-	
a.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7 Perusahaan/Investor	340.000.000,-	
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	100%	72.000.000,-	
a.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	13.530.000,-	
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	59.000 juta rupiah	469.500.000,-	
a.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	59.000 juta rupiah	469.500.000,-	
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100%	8.000.000,-	
a.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	100%	8.000.000,-	
	TOTAL		5.466.536.022,-	

2.4. Rencana Aksi

Rencana Aksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Perjanjian Kinerja Dinas PMPTSP Tahun 2023 yang dituangkan secara berkala (per triwulan). Adapun Rencana Aksi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Sasaran 1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	-	-	-	Sesuai

Rencana Aksi 1

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	1. Persentase Capaian Kinerja (%) 2. Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)	25%	25%	25%	25%		
	Kegiatan 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	2 Dokumen	1 Dokumen	-	25.000.000,-	
	Sub Kegiatan 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang ditetapkan	4 Dokumen				3.000.000,-	Dokumen Renja 2024, Laporan Forum OPD, dan Dokumen Renja Perubahan 2023
	Rencana Aksi : 1. Pengumpulan data, Menyusun draf Perjanjian Kinerja 2023, Casecadding 2023, Rencana Aksi 2023, SOP 2023, dan Renja 2024		✓	-	-	-		
	2. Melaksanakan Forum OPD		✓	-	-	-		
	3. Finalisasi Perjanjian Kinerja 2023, Casecadding 2023, Rencana Aksi 2023, SOP 2023, dan Renja 2024		✓	-	-	-		
	4. Mengimput Renja 2024 pada aplikasi		✓	-	-	-		
	Sub Kegiatan 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	-	-	5.000.000,-	Dokumen RKA SKPD
	Rencana Aksi :		✓	-	-	-		

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	1. Membuat Pra RKA, menginput RKA di Aplikasi, Asistensi RKA, Reviu RKA							
	2. Finalisasi RKA		✓	-	-	-		
	Sub Kegiatan 3 'Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA perubahan SKPD'	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	1 Dokumen	-	5.000.000,-	Dokumen RKA Perubahan SKPD
	Rencana Aksi : 1. Membuat Pra RKA Perubahan, menginput RKA Perubahan di Aplikasi, Asistensi RKA Perubahan, Reviu RKA Perubahan		-	✓	-	-		
	2. Finalisasi RKA Perubahan		-	-	✓	-		
	Sub Kegiatan 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	-	-	3.000.000,-	Dokumen DPA SKPD
	Rencana Aksi : Membuat Pra DPA, menginput DPA di Aplikasi, Asistensi DPA , Reviu DPA		✓	-	-	-		
	Finalisasi DPA Perubahan		✓	-	-	-		
	Sub Kegiatan 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	1 Dokumen	-	3.000.000,-	Dokumen DPA Perubahan SKPD
	Rencana Aksi : Membuat Pra DPA Perubahan, menginput DPA Perubahan di Aplikasi, Asistensi DPA Perubahan, Reviu DPA Perubahan		-	✓	-	-		
	Finalisasi DPA Perubahan		-	-	✓	-		
	Sub Kegiatan 6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	7 Dokumen	-	-	-	4.000.000,-	Dokumen Capaian Kinerja

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD							
	Rencana Aksi : 1. Pengumpulan data, penyusunan daraf LAKIP 2022, LKPJ 2022, LPPD 2022, dan Laporan Evaluasi Internal 2023 per triwulan		✓	✓	✓	✓		
	2. Asistensi LAKIP 2022, LKPJ 2022, dan LPPD 2022		✓	-	-	-		
	3. Finalisasi LAKIP 2022, LKPJ 2022, LPPD 2022, dan Laporan Evaluasi Internal 2023 per triwulan		✓	✓	✓	✓		
	Sub Kegiatan 7 Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	-	-	-	4.000.000,-	Dokumen SAKIP
	Rencana Aksi : 1. Mengumpulkan Data Evaluasi Kinerja 2022		✓	-	-	-		
	2. Menyetor Dokumen Evaluasi Kinerja 2022 kepada Inspektorat Daerah		✓	-	-	-		
	3. Melakukan Revisi Dokumen Evaluasi kinerja 2022 atas Review Inspektorat Daerah		✓	-	-	-		
	4. Menginput Dokumen Evaluasi Kinerja 2022 pada Aplikasi		✓	-	-	-		
	Kegiatan 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia						
	Sub Kegiatan 1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang	49 Orang	49 Orang	49 Orang	3.805.752.022,-	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN							
	Rencana Aksi: 1. Mengambil ampra gaji pada Bidang Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		✓	✓	✓	✓		
	2. Membuat SPM dan SPP kekurangan Gaji		✓	✓	✓	✓		
	3. Membuat daftar potongan gaji		✓	✓	✓	✓		
	4. Membuat SPM dan SPP Gaji		✓	✓	✓	✓		
	5. Membuat Konsep kenaikan gaji berkala (KGB) ASN		✓	✓	✓	✓		
	Sub Kegiatan 2 Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen				5.000.000,-	
	Rencana Aksi: 1. Pengumpulan data, penyusunan draf Laporan Keuangan		✓	-	-	-		
	2. Asistensi LK dan Finalisasi LK		✓	-	-	-		
	Sub Kegiatan 3 penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan		1 Dokumen		1 Dokumen	5.000.000,-	
	Rencana Aksi: 1. Pengumpulan data, penyusunan draf Laporan Keuangan Semesteran		-	✓	-	-		
	2. Asistensi LK dan Finalisasi LK Semesteran		-	✓	-	-		
	Sub Kegiatan 4 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	6.000.000,-	
	Rencana Aksi:		✓	✓	✓	✓		

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	1. Pengumpulan data, penyusunan draf Laporan RFK							
	2. Asistensi RFK dan Finalisasi RFK		✓	✓	✓	✓		

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	. Persentase Capaian Kinerja (%) . Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)	25%	25%	25%	25%		
	Kegiatan 1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	2 Dokumen	1 Dokumen	-	25.000.000,-	
	Sub Kegiatan 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						
	Rencana Aksi: . Pengumpulan data							
	. Pengimputan data pada aplikasi . Melakukan Asistensi							
	. Finalisasi Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
	Sub Kegiatan 2 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,-	Dokumen Rekonsiliasi Aset
	Rencana Aksi : . Melakukan Penyusunan Rekonsiliasi Barang		✓	✓	✓	✓		
	. Melakukan Penyusunan Rekonsiliasi Persediaan Barang		✓	✓	✓	✓		
	Sub Kegiatan 3 Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,-	Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	. Rencana Aksi : Mengumpulkan bahan KIB, KIR dan Aset Tetap		✓	✓	✓	✓		
	. Melakukan Penyusunan KIB, KIR dan Aset Tetap		✓	✓	✓	✓		
	. Melakukan Asistensi		✓	✓	✓	✓		
	. Memfinalisasi dokumen KIB, KIR dan Aset Tetap		✓	✓	✓	✓		

Sasaran 2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks kepuasan layanan non SPM urusan Penanaman Modal	-	-	-	72,50 %

Rencana Aksi 2

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	3. Persentase Capaian Kinerja (%) 4. Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)	25%	25%	25%	25%		
	Kegiatan 1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	2 Dokumen	1 Dokumen	-	25.000.000,-	
	Sub Kegiatan 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						
	Rencana Aksi: 1. Pengumpulan data							
	2. Pengimputan data pada aplikasi							
	3. Melakukan Asistensi							

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	4. Finalisasi Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
	Sub Kegiatan 2 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,-	Dokumen Rekonsiliasi Aset
	Rencana Aksi : 1. Melakukan Penyusunan Rekonsiliasi Barang		✓	✓	✓	✓		
	2. Melakukan Penyusunan Rekonsiliasi Persediaan Barang		✓	✓	✓	✓		
	Sub Kegiatan 3 Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,-	Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah
	Rencana Aksi : 1. Mengumpulkan bahan KIB, KIR dan Aset Tetap		✓	✓	✓	✓		
	2. Melakukan Penyusunan KIB, KIR dan Aset Tetap		✓	✓	✓	✓		
	3. Melakukan Asistensi		✓	✓	✓	✓		
	4. Memfinalisasi dokumen KIB, KIR dan Aset Tetap		✓	✓	✓	✓		

Sasaran ke 3

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya Kerjasama investasi	Nilai Investasi PMDN (Rp Juta)				38.500
		Nilai Investasi PMA (\$ Juta)				1,50

Rencana aksi 3

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor PMDN/PMA	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali		
	Kegiatan 1. Penyelenggraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	Jumlah Penerimaan Misi Penanaman Modal	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	340.000.000	
	Sub Kegiatan 1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	340.000.000	Dokumen Hasil KegiatanPromosi Penanaman Modal Kabupaten /Kota
	Menyusun KAK Fisibility Studi (FS) atau Kajian Kelayakan Investasi		✓					

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	Menyusun SK TIM Fisibility Studi (FS) atau Kajian Kelayakan Investasi		✓					
	Menyiapkan Rapat TIM Fisibility Studi (FS) atau Kajian Kelayakan Investasi			✓	✓			
	Pengumpulan Bahan Dokumen Fisibility Studi (FS) atau Kajian Kelayakan Investasi			✓	✓	✓		
	Penyusunan Dokumen Fisibility Studi (FS) atau Kajian Kelayakan Investasi			✓	✓	✓		
	Melaksanakan Asistensi			✓	✓	✓		
	Finalisasi Dokumen Fisibility Studi (FS) atau Kajian Kelayakan Investasi			✓	✓	✓		
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase potensi untuk peluang Investasi Daerah (%)	50%	50%	50%	50%	50.000.000	
	Kegiatan 1 Penetapan Pemberian Fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/ kota	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	5 Perusahaan				50.000.000	
	Sub Kegiatan 1 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	Dokumen Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kemudahan Penanaman Modal						Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
	Rencana Aksi : Pengumpulan bahan Perda Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal		✓	✓	✓	✓		
	Penyusunan Perda Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal		✓	✓	✓	✓		
	Melakukan Asistensi		✓	✓	✓	✓		
	Finalisasi Perda Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal		✓	✓	✓	✓		
1	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)	59.000				469.500.000	
	Kegiatan 1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)	59.000				469.500.000	
	Sub Kegiatan 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	182 Orang				348.090.000	Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	Rencana aksi :							
	. Membuat SK Tim Terpadu , KAK Terkait Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		✓	✓				
	. Membuat SK Internal Kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Kepada Pelaku Usaha		✓	✓				
	. Melakukan rapat untuk Menentukan lokasi Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko terkait Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan		✓	✓	✓	✓		
	. Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi dengan OPD terkait sehubungan dengan akan dilaksanakannya Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Kepada Pelaku Usaha		✓	✓	✓	✓		

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	. Melaksanakan Bimbingan Teknis/Sosialisasi implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Kepada Pelaku Usaha		✓	✓	✓	✓		
	. Mengidentifikasi Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya		✓	✓	✓	✓		
	. Menyelesaikan Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya		✓	✓	✓	✓		
	Sub Kegiatan 2 Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Usaha/Kegiatan				121.410.000	Berapa Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
	. Rencana Aksi Membuat SK, KAK Terkait Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		✓	✓				
	. Melaksanakan Analisa dan Verifikasi data, Profil		✓	✓				

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha							
	. Melaksanakan Inspeksi Lapangan		✓	✓	✓	✓		
	. Melaksanakan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha para pelaku usaha		✓	✓	✓	✓		

Sasaran 4

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsive	Persentase izin usaha dan investasi yang dikeluarkan				100%

Rencana Aksi 4

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase izin yang di terbitkan (%)	100%	100%	100%	100%	72.000.000	
	Kegiatan 1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Perizinan dan Non Perizinan	1300 izin				72.000.000	
	Sub Kegiatan 1 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	3 dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	13.500.000	
	Rencana aksi : 1. Menerima masyarakat yang membutuhkan layanan konsultasi dan pengaduan		✓	✓	✓	✓		

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	2. Mendaftarkan identitas masyarakat		✓	✓	✓	✓		
	3. Menyelesaikan permasalahan sesuai tingkat aduan dan konsultasinya		✓	✓	✓	✓		
	4. Membuat Laporan hasil konsultasi dan aduan		✓	✓	✓	✓		
	Sub Kegiatan 2 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	13.530.000	Dokumen Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal
	Rencana Aksi : 1. Penyusunan rencana pemantauan Usaha Beresiko Tinggi dan Menengah Tinggi		✓	✓	✓	✓		
	2. Menyusun Personil yang akan melakukan pemantauan		✓	✓	✓	✓		
	3. Pelaksanaan Pemantauan		✓	✓	✓	✓		
	4. Laporan Hasil Pemantauan Pemenuhan Komitmen		✓	✓	✓	✓		

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	Sub Kegiatan 3 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	325 izin	325 izin	325 izin	325 izin	32.000.000	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan izin
	Rencana Aksi : 1. Menerbitkan Registrasi Pemohon Izin		✓	✓	✓	✓		
	2. Melakukan Proses Berkas		✓	✓	✓	✓		
	3. Menerbitkan Izin		✓	✓	✓	✓		
	Sub Kegiatan 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	3 kali				12.970.000	
	Rencana Aksi: 1. Menerima permohonan fasilitas / Insentif Daerah Daerah dari Pengusaha		✓	✓	✓	✓		
	2. Mengkoordinasikan permohonan kepada tim penilai pemberian fasilitas dan Insentif Daerah		✓	✓	✓	✓		
	3. Menyampaikan ke pemohon terkait hasilpenilaian kelayakan pemberian fasilitas / pemberian insentif		✓	✓	✓	✓		

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi (%)	100%	100%	100%	100%	8.000.000	
	Kegiatan 1 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima	100%	100%	100%	100%	8.000.000	
	Sub Kegiatan 1 Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan berbasis terintegrasi secara elektronik	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kab/kota	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	8.000.000	Laporan pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan sistem informasi
	Rencana Aksi : 1. Menerima dan mencatat permintaan Data sektor baik secara rutin perbulan ke OPD maupun permintaan informasi izin bagi yang membutuhkan		✓	✓	✓	✓		
	2. Memberikan data penerbitan izin setiap bulannya kepada instansi teknis		✓	✓	✓	✓		
	3. Menginformasikan data terkait perizinan melalui website resmi		✓	✓	✓	✓		

2.5. Capaian Kinerja

Adapun hasil capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Triwulan IV tahun 2023 seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.5. Realisasi Capaian Rencana Aksi Sasaran Strategis tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023	Realisasi Capaian			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	72,50%	-	-	-	108,00 %
2	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Sesuai	-	-	-	Sesuai
3	Meningkatnya Kerjasama investasi	Nilai Investasi PMDN (Rp Juta)	10,00%	-	-	-	3.938,19 %
		Nilai Investasi PMA (\$ Juta)	4,00%	-	-	-	21.437,5 %
4	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsive	Persentase izin usaha dan investasi yang dikeluarkan	84%	-	-	-	101,49 %

Sumber Data: Dinas PMPTSP , 31 Desember 2023

Tabel di atas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan. Terlihat bahwa rata- rata target melebihi realisasi capaiannya, seperti Laporan Keuangan OPD sesuai SAP ini ditunjang dengan adanya penggunaan aplikasi SIPD, FMIS dan Manca yang terintegrasi. Adapun persentase realisasi capaian nilai investasi PMA/PMDN ini berkaitan dengan adanya kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku UMKM untuk secara rutin menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara periodik sehingga pengendalian terhadap pencapaian nilai investasi dapat berjalan efektif, begitu pun dengan realisasi capaian dari persentase izin usaha yang dikeluarkan melebihi dari target yakni sebesar 101,49% dikarenakan adanya perubahan KBLI yang mengharuskan pelaku usaha untuk memperbaharui izin usahanya melalui OSS (*online single submission*) sehingga menyebabkan kenaikan persentase izin usaha yang dikeluarkan melebihi dari target tahun 2023.

2.6. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian

Kinerja dan Rencana Aksi. Realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut ini:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	REALISASI	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	5	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	70,28%	60,77 %			
				85,00%	94,57%			
				Rp. 3.244.109.850	Rp. 3.174.498.335	97,85 %		
	Laporan Kinerja Sesuai metode SILAJARA		a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%		
				25.000.000,-	23.680.000,-	94,72%		
			1) Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			
				3.000.000,-	3.000.000,-	100 %		
			2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
				5.000.000,-	4.391.000,-	87,82 %		
			3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA perubahan SKPD	1Dokumen	1Dokumen			
				5.000.000,-	5.000.000,-	100 %		
			4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
				3.000.000,-	2.289.000,-	76,30 %		
			5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA perubahan SKPD	1 Dok	1 Dok			
				3.000.000,-	3.000.000,-	100 %		
			6) Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan			
				2.000.000,-	2.000.000,-	100 %		
			7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan			
				4.000.000,-	4.000.000,-	100 %		
			b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
				2.422.750.000,-	2.363.722.621,-	97,56 %		
			1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	26 Orang/Bulan	26 Orang/Bulan			
				3.724.015.000,-	3.656.458.850,-	98,19 %		
			2) Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	1 Dok			
				4.000.000,-	4.000.000,-	100 %		
			3) Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/ semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan			
				4.000.000,-	4.000.000,-	100 %		
			4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15 Dokumen	15 Dokumen			
				5.000.000,-	5.000.000,-	100 %		
			c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	100%			
				12.000.000,-	12.000.000,-	100 %		
				2 Dok	2 Dok			

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	REALISASI	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	5	7	8	9	10	11
			1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	4.000.000,-	4.000.000,-	100 %		
			2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Dok 4.000.000,-	2 Dok 4.000.000,-	100 %		
			3) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2 Dok 4.000.000,-	2 Dok 4.000.000,-	100 %		
			d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100% 262.216.900,-	100 % 262.216.900,-			
			1) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 Paket 10.006.900,-	2 Paket 10.006.900,-	100 %		
			2) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5 Dokumen 5.100.000,-	5 Dokumen 5.100.000,-	100 %		
			3) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 Laporan 247.110.000,-	100 Laporan 247.110.000,-	100 %		
			e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100% 10.722.000,-	100% 10.722.000,-	100%		
			1) Pengadaan Aset Tak Berwujud					
			2) Pengadaan mebel					
			3) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	2 Unit 10.722.000,-	2 Unit 10.722.000,-	100% 100%		
			f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100% 420.834.950,-	100% 413.743.148,-	98,31		
			1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Laporan 146.212.750,-	3 Laporan 144.106.948,-	98,56 %		
			2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	3 Laporan 274.622.200,-	3 Laporan 269.636.200,-	98,18 %		
			g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32 unit 90.586.000	32 unit 88.366.000,-	97,54 %		
			1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan Perizinan kendaraan dinas atau operasional lapangan	12unit 20.800.000,-	12 unit 19.015.000,-	91,42 %		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	REALISASI	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	5	7	8	9	10	11
			2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	25 Unit 31.710.000,-	25 Unit 31.369.000,-	98,92 %		
			3) Pemeliharaan/rehanilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Jenis 5.016.000,-	1 Jenis 5.016.000,-	100 %		
			4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit 33.060.000	2 Unit 32,965.000	99,71 %		
2	Meningkatnya Investasi	Nilai Investasi PMDN (Rp Juta)	Program Promosi Penanaman Modal	240 Perusahaan 340.000.000,-	1.878 339.437.200,-	99,83%		
		Nilai Investasi PMA (\$ Juta)	Kegiatan Penyelenggraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	3 Kali 340.000.000,-	7 Kali 339.437.200,-	99,83%		
			1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	- 3 dokumen 340.000.000,-	- 3 dokumen 339.437.200,-	- 100% 99,83%		
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	52.000 469.500.000,-	76.286 319.688.000,-	66,98 %		
			Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	52.000 469.500.000,-	76.286 319.688.000,-	66,98 %		
			1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	204 pelaku usaha 348.090.000,-	251 pelaku usaha 221.640.800,-	59,59 %		
			2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	60 Kegiatan Usaha 121.410.000,-	79 Kegiatan Usaha 92.815.000,-	76,45 %		
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	40% 50.000.000,-	60% 48.321.900,-	96,64 %		
			kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman	1 dokumen 50.000.000,-	1 dokumen 48.321.900,-	100% 96,64 %		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	REALISASI	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	5	7	8	9	10	11
			Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
			1) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen 50.000.000,-	1 dokumen 48.321.900,-	100% 96,64 %		
			Program Pelayanan Penanaman Modal	100% 71.926.000,-	100%,- 71.695.800	99,67%		
			Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1300 izin 71.926.000,-	2621 Izin 71.695.800	99,67%		
			1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1300 Pelaku Usaha 44.938.000,-	1878 Pelaku Usaha 44.732.500,-	231,03% 99,54%		
			2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	13 Kegiatan Usaha 13.510.000,-	13 Kegiatan Usaha 13.510.000,-	100 %		
			3) Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	4 Pelaku Usaha 13.484.000,-	4 Pelaku Usaha 13.453.300,-	99,77 %		
			4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	- -	- -			
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100% 7.992.000,-	100% 7.965.000,-	99,66 %		
			Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100% 7.992.000,-	100% 7.965.000,-	99,66 %		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	REALISASI	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	5	7	8	9	10	11
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegarsi secara Elektronik	12 Dokumen	15 Dokumen			
				7.992.000,-	7.965.000,-	99,66 %		
Total				4.183.533.850,-	3.956.374.035,-	94,57%		

Sumber: RFK bulan Desember Dinas PMPTSP

Tabel 2.6 di atas menunjukkan realisasi anggaran tahun 2023 dari 33 sub kegiatan sebesar **Rp. 3.956.374.035** atau **94,57%** dari total pagu anggaran sebesar **Rp. 4.183.533.850** dengan demikian terdapat sisa pagu sebesar **Rp. 227.159.815**. Meskipun persentase serapan anggaran masih tergolong tinggi. Besaran angka tersebut disebabkan karena realisasi anggaran dari beberapa kegiatan yang tidak mencapai 100% utamanya pada kegiatan pengendalian penanaman modal yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik. Persentase capaian kegiatan tersebut hanya sebesar 66,98% dan menyisakan dana sebesar Rp. 149.812.000 dari jumlah pagu kegiatan sebesar Rp. 469.500.000. Penyebab besaran realisasi yang tergolong sedang tersebut disebabkan karena pelaksanaan teknis kegiatan pengawasan dan pembinaan penanaman modal yang direncanakan berada di Kecamatan Pasimarannu dan Pasilambena yang terkendala kondisi cuaca buruk dalam pelaksanaannya.

2.7. Faktor Pendukung dan Penghambat

Pelaksanaan pencapaian kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tentunya tidak terlepas daripada faktor pendukung dan faktor penghambat serta faktor intenal dan eksternal terhadap realisasi capaian rencana aksi yang telah dicapai. Adapun faktor penghambat dan faktor pendukung berdasarkan indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Faktor Pendukung dan Penghambat realisasi capaian

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Dibutuhkan perencanaan anggaran yang lebih baik agar pemenuhan sarana dan prasarana serta komunikasi MPP dapat dilengkapi guna kenyamanan pengunjung	1. Sarana dan prasarana MPP yang belum mendukung 2. Belum optimal proses pelayanan PTSP pada pelayanan perizinan sesuai dengan SOP sebab tidak semua Tim Teknis bergabung di MPP setiap hari kerja 3. Keterbatasan anggaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
2	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	1. Melakukan Penataan SDM sesuai dengan potensi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur	1. Regulasi yang ada di tingkat lebih atas sering berubah sesuai perkembangan dan penyesuaian dengan kondisi yang terkini 2. Keterbatasan anggaran
3	Meningkatnya Kerjasama investasi	Nilai Investasi PMDN (Rp Juta)	Melakukan revisi terhadap regulasi yang mengarah kepada pemberian insentif kepada investor	1. Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan investasi 2. Tidak semua investor membuat laporan /LKPM melalui aplikasi OSS
		Nilai Investasi PMA (\$ Juta)		
4	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsive	Persentase izin usaha dan investasi yang dikeluarkan	1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu	1. Sarana dan prasarana MPP yang belum mendukung 2. Belum optimal proses pelayanan PTSP pada pelayanan perizinan sesuai dengan SOP sebab tidak semua Tim Teknis bergabung di MPP setiap hari kerja

BAB III

PENUTUP

Rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2023 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya yang tidak hanya sebagai panduan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait langsung dengan perjanjian kinerja dinas tahun 2023, namun juga sebagai tolok ukur dalam menilai berhasil atau tidaknya pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja tidak terlepas dari perencanaan yang merupakan kunci utama. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari tingkat keberhasilan dan relatif tidak adanya permasalahan/hambatan yang timbul.

Dengan tersusunnya rencana aksi pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

Benteng, 31 Desember 2023

Kepala Dinas PMPTSP,

Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660507 198603 1 022